

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Penerimaan Pajak Digenjot untuk Menutup Defisit

Dari semua jenis pendapatan, pajak mobil mewah dinilai paling potensial.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA—Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta berusaha menggenjot penerimaan pajak tahun ini yang baru mencapai 73 persen. Target penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 44,5 triliun, tapi hingga awal November 2019 baru mencapai Rp 33,5 triliun. Kekurangan yang Rp 11 triliun inilah yang akan dikejar oleh BPRD.

Kepala BPRD Faisal Syafruddin menuturkan, dari semua jenis pendapatan, pajak kendaraan bermotor (PKB) mewah dinilai paling potensial untuk meningkatkan target penerimaan. Setidaknya ada 1.140 unit kendaraan mewah yang belum membayar pajaknya hingga 22 November 2019. "Data bahkan ada 1.620 kendaraan, sekarang sudah berkurang menjadi 1.140," ujar Faisal, kemarin.

Menurut Faisal, penagihan pajak kendaraan

mewah ini cukup sulit karena pemilik kendaraan justru kerap berupaya menghindari untuk memenuhi kewajiban. Modus yang biasa digunakan adalah registrasi kendaraan dengan menggunakan identitas orang lain.

"Sudah banyak kasus kami temukan. Ketika kami datang alamat yang terdaftar, ternyata bukan warga mampu," katanya. Faisal menambahkan, modus seperti itu hanya bisa diatasi dengan sistem *door to door*. Petugas pajak mendatangi alamat pemilik kendaraan. "Kalau bisa langsung di-track yang meminjam KTP-nya bisa langsung ditagih."

Faisal menegaskan, pemerintah tidak akan segan-segan lagi menindak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban hingga akhir 2019. "Akan dicabut registrasi kendaraannya sehingga menjadi kendaraan bodong dan tak bisa lagi perpanjang STNK dan balik nama," katanya. Selain itu, kendaraannya akan disita dan dilelang

untuk melunasi tunggakan tersebut.

Bukan hanya kendaraan mewah, penunggak pajak bangunan, bisnis, dan hiburan juga akan dikenai sanksi. Hukuman yang disiapkan antara lain pemasangan stiker atau plang penunggak pajak, surat paksa, sita lelang, pencabutan perizinan usaha, pemblokiran rekening, dan rencana *gijzeling* (saudera badan).

Faisal mengatakan pemerintah Jakarta saat ini masih menjalankan keringanan pajak daerah hingga akhir 2019. Seharusnya warga Ibu Kota bisa memanfaatkan itu karena kebijakan itu karena pemerintah memberikan potongan beberapa jenis pajak. Di antaranya keringanan pokok PKB sebesar 50 persen sampai dengan 2012, keringanan pokok PKB sebesar 25 persen mulai 2013 sampai 2016, dan keringanan 50 persen untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) kedua dan seterusnya. Sedangkan pajak bumi

dan bangunan mendapat potongan sebesar 25 persen mulai 2013 sampai 2016.

Selain potongan pajak, kata Faisal, masyarakat bisa menikmati penghapusan sanksi administrasi piutang pajak pada sembilan jenis pajak, yaitu PKB, BBN-KB, hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, dan PBB-P2.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya menyatakan optimistis DKI bisa mengejar target pemasukan pajak untuk menutup defisit anggaran APBD 2019. "Berdasarkan histori beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak pada akhir tahun itu bagus," kata Saefullah, Jumat lalu.

Adapun APBD DKI Jakarta 2019 mengalami defisit karena ada kekurangan pendapatan dari sisa dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun yang belum disetorkan ke kas DKI Jakarta. Dengan demikian pemerintah Jakarta dipaksa untuk menggenjot penerimaan pajak guna menutupi defisit tersebut. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Penerimaan Pajak Digenjot untuk Menutup Defisit

Pendapatan Pajak

Total perolehan pajak Jakarta saat ini baru mencajai sekitar 73 persen. Berikut ini data pemasukan pajak dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta.

Pajak Kendaraan Bermotor

Target: Rp 8,8 triliun
Realisasi: Rp 7,3 triliun

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Target: Rp 5,6 triliun
Realisasi: Rp 4,5 triliun

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Target: Rp 1,27 triliun
Realisasi: Rp 1,04 triliun

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Target: Rp 10 triliun
Realisasi: Rp 8,8 triliun

Pajak Reklame

Target: Rp 1,05 triliun
Realisasi: Rp 862 miliar

Pajak Air Tanah

Target: Rp 110 miliar
Realisasi: Rp 86 miliar

Pajak Hotel

Target: Rp 1,8 triliun
Realisasi: Rp 1,36 triliun

Pajak Restoran

Target: Rp 3,55 triliun
Realisasi: Rp 2,9 triliun

Pajak Hiburan

Target: Rp 850 miliar
Realisasi: Rp 671 miliar

Pajak Penerangan Jalan

Target: Rp 810 miliar
Realisasi: Rp 669 miliar

Pajak Parkir

Target: Rp 525 miliar
Realisasi: Rp 446 miliar

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Target: Rp 9,5 triliun
Realisasi: Rp 3,7 triliun

Pajak Rokok

Target: Rp 620 miliar
Realisasi: Rp 533 miliar

Mobil Mewah (harga di atas Rp 1 miliar)

Total per September 2019:

1.620 unit

sudah melunasi pajak tahunan:

480 unit

nilai **Rp 13,92** miliar

Total per 22 November belum melunasi pajak tahunan

1.140 unit

- Aston Martin: 10 unit
- Audi: 20 unit
- Bentley: 13 unit
- BMW: 121 unit
- Cadillac: 10 unit
- Chevrolet: 1 unit
- Ferrari: 44 unit
- Ford: 2 unit
- Harley Davidson: 1 unit
- Hummer: 15 unit
- Infiniti: 1 unit
- Iveco: 2 unit
- Jaguar: 22 unit
- Jeep: 6 unit
- Lamborghini: 17 unit
- Land Rover: 77 unit
- Lexus: 100 unit
- Lotus: 1 unit
- Maserati: 12 unit
- McLaren: 8 unit
- Mercedes-Benz: 396 unit
- Mitsubishi: 1 unit
- Morgan: 1 unit
- Nissan: 11 unit
- Porsche: 138 unit
- Range Rover: 3 unit
- Rolls-Royce: 19 unit
- Toyota: 88 unit
- VW: 1 unit
- Zele: 1 unit

SUMBER: BPRD DKI